

PERANAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA
LEMBAH HARAU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

RANDI IRAWAN
TM/NIM : 97325/2009

PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah
Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota**

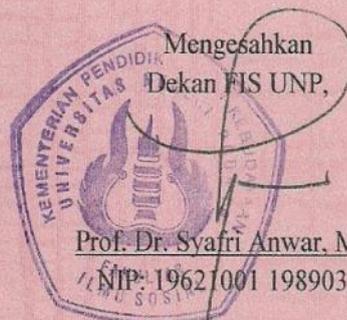
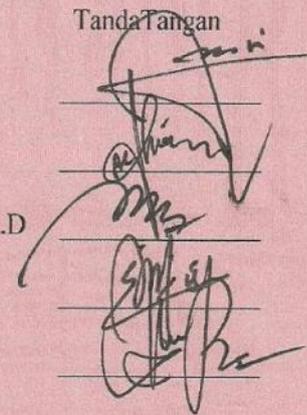
Nama : Randi Irawan
TM/NIM : 2009/97325
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Padang, 29 Juli 2013

Tim Penguji:

Ketua : Dra. Hj. Jumiaty, M.Si
Sekretaris : Lince Magriasti, S.IP, M.Si
Anggota : Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA. Ph.D
Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si
Anggota : Nora Eka Putri, S.IP, M.Si

Tanda Tangan



ABSTRAK

Randi Irawan : NIM. 2009/97325. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa persoalan yang terdapat dalam kepariwisataan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pariwisata merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah. Pengembangan sektor pariwisata merupakan keseriusan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terbukti dengan dimasukkannya rencana pengembangan kawasan wisata, salah satunya obyek wisata Lembah Harau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini sesuai dengan peranan Dinas Budparpora dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau. Tapi pengembangan Lembah Harau sampai sekarang ini belum memiliki kemajuan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari: *pertama*, promosi dan destinasi pariwisata. *Kedua*, kelayakan sarana dan prasarana, *ketiga*, tingkat kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Dinas Budparpora dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini bersifat kualitatif melalui metode deskripsi. Untuk melengkapi data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dari Dinas Budparpora khususnya Bidang Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang diperoleh, dielaborasi dengan tahap seleksi dan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi atau pemaknaan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Budparpora khususnya Bidang Pariwisata telah melakukan peranannya dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau. Namun, upaya yang dilakukan masih belum maksimal, masih ada beberapa kendala; tingkat pemahaman masyarakat tentang pariwisata masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang cukup memadai dan dalam kondisi yang baik serta dalam kondisi rusak, sehingga mempengaruhi jumlah pengunjung dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, Dinas Budparpora perlu mengoptimalkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari obyek wisata Lembah Harau dengan cara program dan strategi promosi, pemasaran, destinasi dan kemitraan pariwisata yang jelas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil a'lamiiin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA LEMBAH HARAU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalam penulis ucapkan untuk kedua orangtua tercinta Ayahanda Wirson dan Ibunda Asmadiarti, S. Pd yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dra. Hj. Jumiati, M. Si selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu Lince Magriasti, S. IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D, Ibu Dra. Al Rafni, M. Si dan Ibu Nora Eka Putri, S. IP, M. Si, terima kasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumbar yang telah membantu dan memberikan penulis kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai.
7. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2009, terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 17 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Mamfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	12
1. Teori Peranan	12
2. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	15
3. Pengertian Wisata dan Pariwisata.....	20
B. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33

C. Informan Penelitian	33
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	34
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	37
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Obyek Wisata Lembah Harau	40
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	44
B. Temua Khusus	53
1. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	53
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota	64
3. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Di Hadapi Oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau Di Kabupaten Lima Puluh Kota	74
C. Pembahasan	79
1. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota	79

2. Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota	85
3. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Di Hadapi Oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau Di Kabupaten Lima Puluh Kota	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Pendapatan Asli Daerah Dari Obyek Wisata Lembah harau dan Batang Tabik di Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Tahun 2010 Sampai 2012	5
Tabel1.2 Pendapatan Asli Nagari Dari Obyek Wisata Batang Tabit Dari Tahun 2010 Sampai 2012	5
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	34
Tabel 4.1 Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pada Taman Rekreasi Anak Aka Barayun.....	72
Tabel 4.2 Jenis, Jumlah Kondisi Sarana dan Fasilitas Wisata di Resort Sarasa Bunta.....	73
Tabel 4.3 Jenis, Jumlah, Kondisi Sarana dan Fasilitas Wisata di Resort Aka Barayun	73
Tabel 4.4 Data Kunjungan Khusus Lembah Harau	81
Tabel 4.5 Rencana Pembiayaan / Investasi Untuk Pengembangan Kawasan Lembah Harau	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	53
Gambar 4.2 Pusat Pelayanan Informasi lembah Harau	60
Gambar 4.3 Harau Nan Indah	61
Gambar 4.4 Sampah Berserakan	61
Gambar 4.5 Taman Bermain	62
Gambar 4.6 Sarana Tidak Terjaga	70
Gambar 4.7 Masyarakat sekitar yang memberika tiket masuk	71
Gambar 4.8 Keadaan Kamar Ganti/WC Umum	73
Gambar 4.9 Tiket masuk Lembah Harau	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri (otonomi) sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah, salah satunya dengan mengaplikasikan asas desentralisasi. Asas desentralisasi ditujukan untuk mengatasi keterbatasan dalam perencanaan yang bersifat sentralistik, yaitu dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam pembangunan daerah . Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat (1) poin (a) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: “perencanaan dan pengendalian pembangunan”.

Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Ini berarti, pelimpahan tanggung jawab diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan.

Untuk menjalankan tanggung jawab yang dilimpahkan untuk mengurus rumah tangga sendiri (desentralisasi), maka diperlukan pembiayaan yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.

Untuk mengembangkan sektor pariwisata pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan (Fajar, www.padangekspres.com: 2013). Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, yaitu sebagai Pendapatan Asli Daerah meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak di bagian timur wilayah Propinsi Sumatera Barat yaitu 00 22' LU dan 00 23'LS serta antara 1000 16' - 1000 51' BT dan berbatasan langsung dengan Propinsi Riau. Di samping mempunyai potensi dibidang kepariwisataan dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat, daerah ini juga berada pada jalur strategis yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau dan juga ketersediaan sumber daya alam yang membuat pertumbuhannya sangat dinamis (www.limapuluhkota.go.id/profil.html. diakses tanggal 15 Maret 2013).

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi alam yang cukup beragam seperti danau, sungai, air terjun, ngarai, hutan dengan berbagai jenis flora dan fauna dan sebagainya. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan kepariwisataan daerah. Pada saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan pengembangan pariwisata dan menitikberatkan pengembangan pada beberapa objek wisata alam. Potensi sumber daya pariwisata alam prioritas tersebut perlu diketahui sehingga dapat dibuat suatu rencana pengembangan pariwisata alam prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota, mempunyai beberapa kelompok jenis wisata yakni: Wisata Alam (33 objek) yang menjadi andalan 3 objek, adalah: Lembah Harau, Kapalo Banda dan Batang Tabik. Wisata Budaya (6 Objek) yang menjadi andalan seperti Rumah Gadang Sungai Baringin, Rumah Ukiran Cino di Simalanggang, Perkampungan Belubus, Perkampungan seribu Gonjong di Koto

Tinggi Kecamatan gunung Omeh. Wisata Sejarah (9 Objek) yang menjadi andalan seperti : Makam Pahlawan Situjuh, Tugu PDRI di Halaban, Rumah Tua Tan Malaka, dan Wisata Arkeologi (4 Objek) seperti Komplek Menhir di Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Komplek Menhir Belubus, Kecamatan Guguak (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013).

Pengembangan sektor pariwisata merupakan keseriusan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti dengan dimasukkannya rencana pengembangan kawasan wisata, salah satunya obyek wisata Lembah Harau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tidak saja masuk dalam RPJP dan RPJM, pengembangan obyek wisata Lembah Harau ini malah menjadi program prioritas dalam agenda daerah tahun 2012-2015 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor pariwisata. Jika kawasan ini selesai dikembangkan, menurut Novian Burano ([sitinjaunews.com/Kawasan Wisata Masuk Skala Prioritas RPJP dan RPJM](http://sitinjaunews.com/KawasanWisataMasukSkalaPrioritasRPJPdanRPJM). Diakses tanggal 20 Februari 2012) kemungkinan PAD Lima puluh Kota dapat terdongkrak hingga 10 persen.

Objek wisata Lembah Harau merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Lembah Harau ini adalah objek wisata unggulan daerah dan berada pada Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I pengembangan objek wisata Kabupaten Lima Puluh Kota. Objek wisata Lembah Harau Terletak di Kecamatan Harau, berada \pm 2 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satunya yang menyumbang

Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dari sektor pariwisata.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui tugas pokok dan fungsi yang diantaranya yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata. Dinas Budparpora bertekad untuk mengembangkan obyek wisata, salah satunya Lembah Harau, karena obyek wisata ini merupakan satu-satunya penyumbang PAD untuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Tekad ini terlihat dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan Administratif) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2010 sampai 2012, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Dari Obyek Wisata Lembah Harau dan Batang Tabik
di Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Tahun 2010 Sampai 2012

No	Tahun	Lembah Harau		
		Target (Juta)	Terealisasi (Juta)	Persentase %
1	2010	109,5	135,839	124,05 %
2	2011	217,32	163,892	75,41 %
3	2012	350,5	360,454	102,83 %

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Nagari Dari Obyek Wisata Batang Tabik
di Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Tahun 2010 Sampai 2012

No	Tahun	Batang Tabik		
		Target (Juta)	Terealisasi (Juta)	Persentase %
1	2010	50	50	100 %
2	2011	35	35	100 %
3	2012	35,5	35,5	100 %

Sumber: Nagari Sungai Kumunyang, 2013.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dilihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 dan 2012 melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2011 terjadi penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh awal tahun pelaksanaan dari rencana Pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dan prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya pada obyek wisata Lembah Harau. Sedangkan untuk Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) lainnya, seperti Batang Tabit belum dikelola oleh Pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sehingga Batang Tabit masih dikelola oleh nagari dan sebagai sumber pendapatan nagari. Batang Tabit dijadikan sebagai Wilayah Pengembangan II dikarenakan sumber pendapatan dari kawasan ini cukuplah menjanjikan, maka pemerintah dikemudian hari akan mengembangkan obyek wisata Batang Tabit.

Adapun secara umum yang menjadi permasalahan dalam pengembangan obyek wisata Lembah Harau antara lain adalah :

1. Minimnya sarana promosi dan pelayanan kebutuhan wisatawan di objek wisata Lembah Harau.
2. Pengelolaan objek yang belum professional.
3. Rendahnya sadar wisata masyarakat di sekitar objek wisata.
4. Fasilitas pendukung di objek- objek wisata belum tersedia.
5. Masih minimnya jumlah SDM aparatur (PNS) yang ada baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, *pertama* dalam hal ini yaitu faktor kebijakan teknis di bidang pariwisata. Salah satu dari kebijakan teknis ini berupa kegiatan promosi wisata oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga. Kegiatan promosi pariwisata terhambat dalam hal anggaran serta ketidakmampuan pemerintah dalam hal promosi, dikerenakan biaya media promosi sangat mahal. *Kedua*, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata. Pelayanan umum dalam hal ini adalah kegiatan kerja sama dan pemungutan retribusi dalam rangka pengembangan obyek wisata Lembah Harau belum maksimal. Hal ini terjadi karena belum masih sedikitnya *stakeholder* dan belum ada kesungguhan pemerintah untuk mengambil alih dalam memberikan pelayanan terutama dalam retribusi (wawancara, 27 Mei 2013 dengan Kabag Pariwisata dengan Bapak Ali Hasan). Seharusnya, dinas Budparpora menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Permasalahan lain (eksternal) yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengembangkan Lembah Harau yaitu objek wisata Lembah Harau, yaitu: *pertama*, belum tertatanya kawasan obyek wisata Lembah Harau dan, sehingga belum menciptakan daya tarik bagi pengunjung. *Kedua*, Pengelola pariwisata masih belum profesional dan belum memiliki RIPPDA seperti pemungutan retribusi sepenuhnya belum dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. *Ketiga*, sarana dan prasarana pendukung pariwisata juga belum memadai seperti banyaknya sarana dan prasarana yang rusak (www.padangekspres.com/Masih Dianggap Sumber Pekat,

Objek Wisata belum Tertata.html, diakses 15 Maret 2013). Hal ini menyebabkan pengembangan obyek wisata Lembah Harau sampai sekarang belum maksimal.

Kondisi ini berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 15 Februari 2013 di Lembah Harau, bahwasanya sarana dan prasana pendukung di kawasan ini memang belum memadai dan ada yang rusak, seperti angkutan wisata masih minim, akses telekomunikasi belum sepenuhnya memadai, kios-kios masih sedikit. Maka dari itu, untuk memajukan Lembah Harau maka pemerintah setempat harus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan dinas terkait di Kabupaten Lima Puluh Kota, karena kawasan wisata ini tersebut juga dapat dijadikan destinasi (tujuan) wisata Sumatera Barat.

Paling mengkhawatirkan lagi, Objek wisata andalan Lima Puluh Kota seperti Lembah Harau, tidak bisa dieksploitasi secara maksimal karena berada di kawasan konservasi, urai Bapak Ali Hasan Kepala Bidang Pariwisata Lima Puluh Kota (Padang Ekspres, 2013). Sehingga peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan obyek wisata Lembah Harau terhambat, dikarenakan lahan yang berada dalam lingkungan kawasan konservasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan izin pengelolaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami bagaimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjalankan peranan dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ **Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Mengembangkan Obyek Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota** ”.

B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan, yaitu sebagai berikut :

- a. Belum terkelolanya sektor pariwisata terutama obyek wisata Lembah Harau secara optimal oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Kabupaten Lima Puluh Kota ternyata juga belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
- c. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Lembah Harau belum memadai dan objek wisata Lembah Harau, belum tertata, sehingga belum menciptakan daya tarik.
- d. Objek wisata andalan Lima Puluh Kota seperti Lembah Harau, tidak bisa dieksploitasi secara maksimal karena berada di kawasan konservasi.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan luasnya aspek yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Rumusan masalah

Dari penjelasan latar belakang, dapat dirumuskan masalah yaitu :

- a. Bagaimana peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
- b. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
- c. Apa upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Untuk melihat upaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, mamfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam hal pengembangan sektor pariwisata khususnya Lembah Harau.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain, untuk keperluan serupa atau untuk menambah wawasan tentang Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dari Lembah Harau.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai landasan teori akan di bahas tentang : Teori Peranan, Wisata, Pariwisata, Pengembangan Obyek Wisata. Adapun penjelasan mengenai landasan teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Peranan

a. Pengertian

Peranan (*role*) menurut Koentjaraningrat dalam buku *Antropologi* merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan (Koentjaraningrat, 1990:169). Peranan merupakan pertanggungjawaban dari tugas yang diemban seseorang, apabila tugas dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya, maka peranannya telah dilaksanakan.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soejono Soekanto, 2002: 243).

Levinson dalam Soejono Soekanto (2002: 244) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Wirutomo (1981: 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Sarjono Arikunto memberi arti peran sebagai perilaku individu atau lembaga yang punya arti bagi struktual sosial. Dalam pandangan David Berry (1995:100), peranan-

peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Sesuai dengan pendapat Gross Masson dan Mc Eachem dalam Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi karangan David Barry (1995: 100) bahwa peranan itu mempunyai dua harapan yaitu : *pertama*, harapan-harapan yang muncul dari masyarakat terhadap yang memegang peranan atau kewajiban yang harus dilaksanakan daei pemegang peranan. *Kedua*, harapan yang harus dimiliki untuk pemegang peran terhadap masyarakat atau orang yng berhubungan dengan dan dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiban lainnya.

b. Ruang Lingkup

Selanjutnya suatu peranan setidaknya mencakup tiga unsur yaitu Soejono Soekanto, 2009: 244) :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pendapat- pendapat di atas peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menentukan perilaku seseorang. Pola perilaku yang dilakukan dalam kelompok merupakan karakteristik dari individu. Perilaku dari setiap individu merupakan hubungan sebab akibat dalam pranata sosial.

- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap peranan bertujuan agar individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang yang di sekitarnya yang bersangkutan atau ada hubungan dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak nilai-nilai sosial.

2. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Dari pengertian diatas, disebutkan aspek dinamis dari kedudukan dari pemegang peranan, bahwa apabila Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melakukan kewajibannya (tugas pokok dan fungsi) maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah menjalankan perannya dalam mengembangkan pariwisata terutama obyek wisata Lembah Harau. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan obyek wisata Lembah Harau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013) :

a. Tugas Pokok

- 1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas pembantuan

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata

Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata merupakan merumuskan kebijakan operasional yang merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pariwisata. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga merumuskan hal-hal apa yang akan dilaksanakan, dan hal-hal yang menyangkut pariwisata. Kebijakan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu dalam bidang promosi wisata, pemasaran di bidang pariwisata, terutama pada obyek wisata Lembah Harau.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata;

Fungsi dalam hal ini merupakan memberikan pelayanan kepada pelaku pariwisata, baik dalam pengurusan hal-hal yang menyangkut pariwisata, maupun kepada *stakeholder* yang melakukan, dan bekerjasama dengan dinas dalam pengembangan pariwisata.

Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UN-WTO), peran pemerintah terkait dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut (Pitana dan Diarta, 2009: 113) :

- 1) Membangun kerangka (*framework*) operasional di mana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata.

- 2) Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
- 3) Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi dan kelengkapan prasarana komunikasinya.
- 4) Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang professional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.
- 5) Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya : (a) Evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya; (b) Identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) Menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (*performance*) pariwisata, dan; (d) Mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran-peran

pemerintah dalam hal ini Dinas Budparpora dalam bidang pariwisata (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013) :

a) Perencanaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para *stakeholder*. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) Perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, (2) Perencanaan penggunaan lahan, (3) Perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) Perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan (5) Perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013).

b) Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013).

c) Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para *stakeholder*. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan

ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa. Namun di Kabupaten Lima Puluh Kota kebijakan pengembangan pariwisata di masukan dalam kebijakan pembangunan, yaitu bidang pariwisata dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah (RPJMD) yang tertuang dalam RPJM dan RPJP 2012-2015 (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013).

d) Peraturan Pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) Peraturan perlindungan wisatawan; (2) Peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (3) Peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan.

3. Pengertian Wisata dan Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Jadi pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu: a. Kegiatan perjalanan; b. Dilakukan secara sukarela; c. Bersifat sementara; d. Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Menurut Salah Wahab dalam Oka A Yoeti (1996: 116.), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Pariwisata menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemertintah Daerah.

Mathieson dan Wall dalam I Gde Pitana (2009 : 46), mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen, yaitu :

- a. *A dynamic element*, yaitu travel ke suatu destini wisata,
- b. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan, dan
- c. *A consequential*, atau akaibat dari dua hal diatas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fifkik adanya kontak dengan wisatawan.

a. Pengembangan Obyek Wisata

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian, dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata.

Pengembangan obyek wisata di samping bertujuan mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian, dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) juga bermamfaat. Beberapa manfaat dalam pengembangan pariwisata ini antara lain:

1) Manfaat Ekonomi:

- a) Adanya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- b) Adanya kesempatan untuk berusaha
- c) Terbukanya lapangan kerja
- d) Meningkatnya Pendapatan masyarakat dan pemerintah

e) Mendorong pembangunan daerah.

2) Manfaat Sosial Budaya

- a) Pelestarian budaya dan adat istiadat
- b) Meningkatkan kecerdasan masyarakat
- c) Mengurangi konflik sosial.

3) Manfaat Bagi Lingkungan.

Berdasarkan hal diatas, Sunardi (2001: 45-46) mengatakan pembangunan pariwisata memiliki 3 fungsi atau tri-fungsi, yaitu :

- 1) Menggalakkan kegiatan ekonomi,
- 2) Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- 3) Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Selain itu, agar tercapainya tri-fungsi tersebut diatas Sunardi (2001: 46) menyatakan bahwa harus ditempuh 3 macam upaya atau tri fungsinya, yaitu :

- 1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, dan,
- 3) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Menurut Salah Wahab (2003: 110) ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada wisatawan sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata, dimana kedua hal tersebut dapat berupa alamiah atau buatan manusia, yaitu :

- 1) Sumber-sumber alam

- a) Iklim: udara lembut, bersinar matahari, kering dan bersih.
 - b) Tata letak tanah dan pemandangan alam: dataran, pegunungan yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk yang unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah gunung berapi, gua dan lain-lain.
 - c) Unsur rimba: hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan sebagainya.
 - d) Flora dan fauna: tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan warna, kemungkinan memancing, berburu dan bersafari foto binatang buas, taman nasional dan taman suaka binatang buas dan sebagainya.
- 2) Hasil karya buatan manusia yang ditawarkan.

Hal-hal yang ditawarkan di kegiatan pariwisata berupa sovevir pariwisata.

b. Promosi Pariwisata

Promosi adalah usaha untuk memajukan sesuatu, sering kali istilah promosi dihubungkan dengan kepariwisataan, berarti usaha untuk memajukan bidang tersebut. Karena tujuan promosi adalah (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013) :

- 1) Untuk memperkenalkan perusahaan kepada pihak luar.
- 2) Untuk meningkatkan penjualan
- 3) Sebagai sarana untuk memberitahukan kepada pihak luar tentang kehebatan perusahaan tersebut.
- 4) Ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahaan atau produk atau jasa terhadap saingan.

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan promosi obyek pariwisata (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013) adalah :

- 1) Agar masyarakat mengetahui bahwa ada obyek pariwisata yang baik untuk di kunjungi.
- 2) Untuk meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan.
- 3) Untuk menunjukkan pada wisatawan tentang keadaan obyek wisata yang mempunyai sifat spesifik dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan obyek pariwisata lainnya.
- 4) Untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat terutama yang ada di lingkungan obyek pariwisata.

c. **Potensi pengembangan Pariwisata**

Dalam melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan bermacam jasa dan produk wisata yang dibutuhkannya. Berbagai macam jasa dan produk wisata inilah yang disebut dengan Komponen Pariwisata. Komponen pariwisata ini dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat atau siapapun yang berminat untuk menyediakan jasa pariwisata. Komponen pariwisata ini bisa meliputi Soekadijo, 1997:46) :

1) **Objek dan daya tarik wisata**

Objek wisata adalah Segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Menurut Spillane (1994: 63-72) ada lima unsur penting dalam suatu objek wisata yaitu: (1) *attraction* atau hal-hal yang menarik perhatian wisatawan; (2) *facilities* atau fasilitas - fasilitas yang diperlukan; (3) *infrastructure* atau

infrastruktur dari objek wisata, (4) *transportation* atau jasa-jasa pengangkutan; (5) *Hospitality* atau keramah-tamahan, kesediaan untuk menerima tamu.

Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

Nyoman S. Pendit dalam bukunya “*Ilmu Pariwisata*” mendefinisikan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.

Daya Tarik Wisata adalah sifat yang dimiliki oleh suatu obyek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan, lain dari pada yang lain memiliki sifat yang menumbuhkan semangat dan nilai bagi wisatawan (dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2013).

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik,

keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu.

2) **Akomodasi**

Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Dalam kepariwisataan akomodasi merupakan suatu industri, jadi pengertian industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar dimana orang-orang/pengunjung/ wisatawan dapat beristirahat/menginap/ tidur, mandi, makan dan minum serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia.

Akomodasi secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

- a) *Akomodasi Komersil*, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti hotel.
- b) *Akomodasi Semi Komersil*, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersil, tetapi juga untuk tujuan sosial (masyarakat yang kurang mampu). Seperti: Home Stay, Rooming House, Holiday Camp, Camping Ground/Camping Site, Wisma, Penginapan, dan lainnya.
- c) *Akomodasi Non Komersil*, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan non komersil, yaitu tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma, namun khusus untuk golongan/kalangan tertentu dan juga

untuk tujuan tertentu. Seperti *Mess* (yang dimiliki instansi pemerintah/departemen), *Guest House* (dilingkungan Istana, khusus bagi tamu negara), Rumah Panti Asuhan, Pemandokan, dan *Villa* (yang dimiliki secara pribadi).

3) **Angkutan Wisata**

Angkuta wisata dapat berupa sarana dan prasarana angkutan wisata seperti mobil/bus, pesawat udara, kereta api, kapal pesiar, dan sepeda.

4) **Sarana dan fasilitas wisata**

Sarana Pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Sarana pariwisata meliputi:

a) **Biro Perjalanan Wisata**

Adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan. Kegiatan usaha biro perjalanan wisata:

- (1) Menyusun dan menjual paket wisata luar negeri atas dasar permintaan.
- (2) Menyelenggarakan atau menjual pelayaran wisata (*cruise*).
- (3) Menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum atau atas dasar permintaan.
- (4) Menyelenggarakan pemanduan wisata.
- (5) Menyediakan fasilitas untuk wisatawan.
- (6) Menjual tiket/karcis sarana angkutan, dan lain-lain.
- (7) Mengadakan pemesanan sarana wisata.

(8) Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b) Bar, restoran, catering dan usaha jasa boga lainnya
- c) Toko cendramata dan pusat kerajinan

Sebagai akibat dari perkembangan kunjungan wisatawan, berbagai sarana penunjang tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan obyek wisata seperti misalnya restoran, *art shop*, pasar seni, sarana hiburan, dan rekreasi.

5) **Prasarana Wisata.**

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah. Dengan mengetahui komponen pariwisata diatas, maka arah pengembangan pembangunan pariwisata bisa terarah dengan baik. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat jika pembangunan pariwisata ini terarah dan bisa memancing minat wisatawan untuk berkunjung.

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dapat menggali potensi-potensi yang

ada di daerah. Dalam hal ini potensi-potensi yang ada di daerah berkenaan dengan pariwisata yang bertujuan dapat peningkatan PAD.

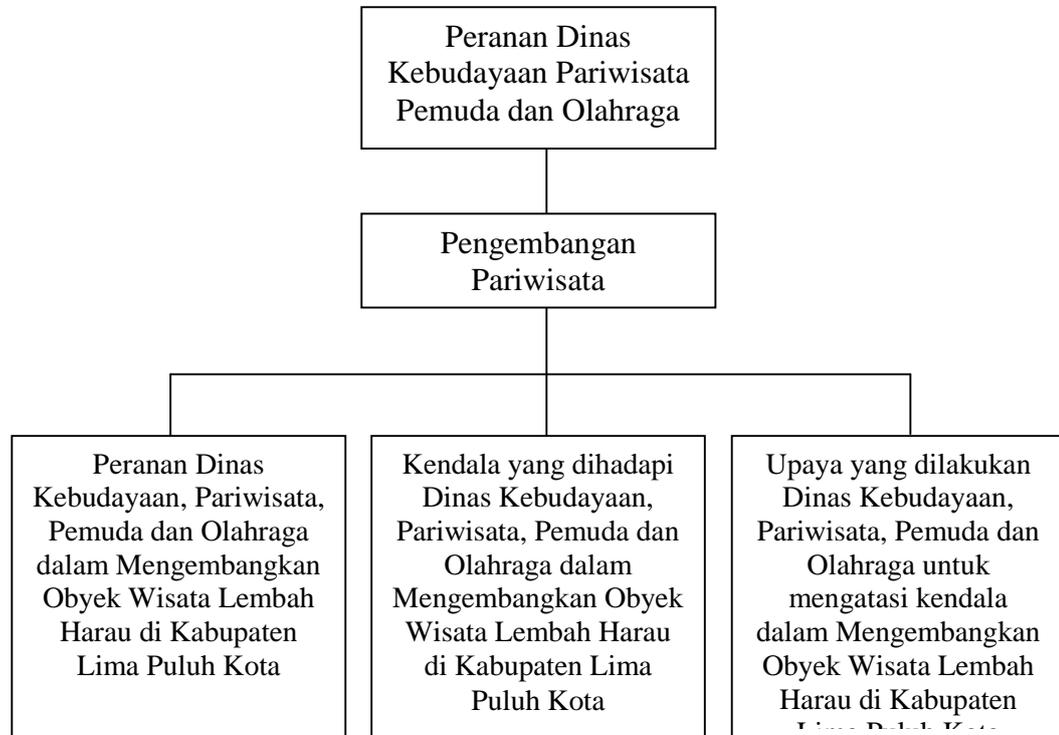
B. Kerangka Konseptual

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional. Untuk itulah maka ditempuh salah satu kebijakan, yaitu menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu, salah satunya dengan mengembangkan potensi obyek wisata. Pengembangan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan obyek wisata yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Proses pengembangan ini sangat berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut maka diharapkan obyek wisata Lembah Harau akan berkembang dan semakin maju. Untuk lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memegang peranan penting dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau belum cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari kunjungan wisatawan ke Lembah Harau yang belum terlalu banyak diluar waktu libur, keterbatasan dan banyaknya sarana dan prasarana yang telah rusak dan juga media dalam promosi dan pengembangan objek wisata Lembah Harau belum terlalu efektif.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam kegiatan Promosi dan pemasaran berupa ketidak sanggupan pemerintah dalam pembiayaan, kerjasama dengan pelaku wisata yang dinilai masih belum optimal, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam obyek wisata Lembah Harau dirasa masih perlu ditingkatkan, serta sarana dan prasarana dalam kondisi baik, sedang dan rusak.

3. Dalam mengembangkan obyek wisata Lembah Harau, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini adalah dengan :
 - a. Penataan dan pengembangan potensi wisata, dengan melakukan pembenahan destinasi wisata, membangun sarana dan prasarana, membentuk kelompok wisata, pembinaan pelaku wisata. Namun, upaya ini belum dilaksanakan dengan maksimal, serta kondisi sarana prasarana dalam kondisi baik, sedang dan rusak sehingga kurang memberikan daya tarik dan rasa nyaman bagi wisatawan.
 - b. Promosi dan pemasaran wisata, dengan mengikuti *event-event* promosi yang diadakan oleh daerah atau lembaga-lembaga pariwisata lain seperti: *climbing dan Tour De Singkarak*. Penyebaran atau publikasi melalui internet dan media masih dirasakan belum maksimal. Penggunaan media lain seperti *Leaflet, Booklet, dan Compact Disc (CD)* belum optimal.

B. Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan dalam meningkatkan mengembangka obyek wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Perlunya sinergitas yang baik dengan SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pariwisata Provinsi, pihak swasta/pengusaha wisata khususnya dalam

membenahi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang perkembangan pariwisata ini.

2. Diharapkan kepada pihak pengelola objek wisata dan Dinas terkait untuk lebih meningkatkan promosi melalui public relation karena lebih efektif dibanding promosi melalui media lain.
3. Diharapkan kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar senantiasa melakukan trobosan-trobosan dalam mempromosikan Lembah Harau sebagai salah satu objek wisata.
4. Diharapkan kepada masyarakat khususnya agar menjaga dan melestarikan Lembah Harau sebagai salah satu kebanggaan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- David Berry. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gamal Suwanto. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miftah Thoha. 1990. *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Bandung: Sinar Baru.
- Muhammad Nasir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nyoman S. Pendit. 2002. *Ilmu pariwisata. Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Pitana dan Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Salah Wahab. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekardijo. 1997. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Sukanto. 2002. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Spillane. 1994. *Pariwisata Indonesia (Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2011. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunardi Joyosuharto. 2001. *Aspek Ketersediaan (Supply) Dan Tuntutan Kebutuhan (Demand) Dalam Pariwisata* Dalam: Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty

Wirutomo. 1981. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.

Yoeti Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: PT. Angkasa.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Website dan Organisasi

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Lima Puluh Kota. 2012. *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*. http://limapuluhkota.org/index.phpmod=content&act=static&id=32&menu_id=48.htm. Diakses 19 Oktober 2012.

Padang Ekspres. 2013. *Masih Dianggap Sumber Pekat, Objek Wisata belum Tertata “Potret Pengembangan Pariwisata di Limapuluh Kota (1)*. <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=38984> diakses tanggal 18 Maret 2013

Sitinjaunews. 2012. *Dua Kawasan Wisata Masuk Skala Prioritas RPJP dan RPJM*. <http://www.sitinjaunews.com/kabupaten-lima-puluh-kota/24772-dua-kawasan-wisata-masuk-skala-prioritas-rpjp-dan-rpjm>. Diakses 13 Maret 2012

Pemerintah Kota Bukittinggi. *Sapta Pesona*. <http://www.bukittinggiwisata.com/v17/index.php/selayang-pandang/sapta-pesona>. Diakses 15 November 2012.

Lima Puluh Kota. 2013. Profil Daerah. www.limapuluhkota.go.id/profil.html. diakses tanggal 15 Maret 2013

www.budparpora.limapuluhkota.go.id